

## **BAB 4**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **4.1 Profil Perpustakaan Nasional Republik Indonesia**

Istilah perpustakaan nasional muncul pertama kali sekitar pada tahun 1954 bersamaan dengan berjalannya Konferensi Perpustakaan Seluruh Indonesia I yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang diselenggarakan di Jakarta, konferensi tersebut mengeluarkan hasil untuk membuat Dewan Perpustakaan Nasional yang mempunyai tujuan akhir untuk mendirikan Perpustakaan Nasional RI dan sebagai lembaga yang mempunyai tugas melakukan pengawasan, memberikan nasehat, dan melakukan koordinasi dalam bidang perpustakaan kepada pemerintah, dilanjutkan pada tahun 1962 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Tim Kerja Persiapan Pendirian Perpustakaan Nasional RI guna mempersiapkan pendirian Perpustakaan Nasional RI.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berdiri sejak tahun 1980, namun pada masa ini Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan belum menjalankan tugas dan fungsi perpustakaan pada umumnya seperti melaksanakan fungsi pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan pendayagunaan bahan pustaka yang terbit di Indonesia dan bibliografi nasional, tugas dan fungsi tersebut dijalankan oleh Pusat Pembinaan Perpustakaan. Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada masa ini berada di tiga lokasi terpisah, setelah keluarnya Keputusan Presiden nomor 11

tahun 1989 gedung Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipindahkan di Jl. Salemba Raya 28A dan kelembagaan tersebut disatukan menjadi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Presiden nomon 11 tahun 1989, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia secara resmi didirikan pada tahun 1989. Pada pasal 19 menjelaskan bahwa Perpustakaan Nasional RI merupakan gabungan dari tiga lembaga, yaitu Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pembinaan Perpustakaan, dan Perpustakaan Wilayah di Provinsi dikarenakan ketiga lembaga tersebut menjalankan fungsi dan tugas perpustakaan nasional hal ini menandakan era baru pada bidang kepastakawanan di Indonesia. Dalam pendirian Perpustakaan Nasional RI menentukan visi dan misi, yaitu visi dari Perpustakaan Nasional RI adalah terwujudnya masyarakat Indonesia cerdas melalui gemar membaca dengan memberdayakan perpustakaan. Adapun misi dari Perpustakaan Nasional RI yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya layanan prima yang mengutamakan kebutuhan penggunanya,
2. Terwujudnya perpustakaan sebagai pelestari khazanah budaya bangsa,
3. Terwujudnya perpustakaan sesuai dengan standar nasional.

Selain menetapkan visi dan misi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 Perpustakaan Nasional RI mempunyai tugas dan fungsi, berikut merupakan tugas Perpustakaan Nasional RI sesuai dengan pasal 21, adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan nasional, umum, dan teknis mengenai pengelolaan perpustakaan,
2. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan koordinasi dalam pengelolaan perpustakaan,
3. Membina dalam kerja sama mengenai pengelolaan perpustakaan,
4. Mengembangkan standar nasional perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Mengkaji dan menyusun kebijakan nasional dalam bidang perpustakaan,
2. Mengkoordinasikan kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Perpustakaan Nasional RI,
3. Memfasilitasi dan membina terhadap kegiatan instansi pemerintah dalam bidang perpustakaan,
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga dalam perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perpustakaan Nasional RI mempunyai wewenang dalam bidang perpustakaan, yaitu:

1. Menyusun rencana nasional secara makro dalam bidang perpustakaan,
2. Merumuskan kebijakan di bidang perpustakaan untuk mendukung pembangunan perpustakaan,

3. Menetapkan sistem informasi dalam bidang perpustakaan.
4. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan tertentu dalam bidang perpustakaan
5. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pelestarian pustaka budaya bangsa dalam mewujudkan koleksi deposit nasional juga pemanfaatannya.

## **4.2 Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial**

Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perubahan layanan perpustakaan dengan melakukan pendekatan pelayanan perpustakaan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (Utami & Prasetyo, 2019). Konsep Inklusi sosial sendiri muncul pertama kali pada tahun 1970 di Prancis dan menjadi pembahasan pada konferensi tingkat tinggi atau disebut *world social development* yang diadakan di Kopenhagen, Denmark pada tahun 1955 dikarenakan pada saat itu terjadinya krisis kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2007 IFLA (*International Federation of Library Associations and Institutions*) membahas mengenai layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial ini pada *world library and information congress* yang diadakan di Durban, Afrika Selatan. IFLA menghimbau kepada seluruh perpustakaan di seluruh negara untuk melibatkan perpustakaan dalam pembangunan nasional dan pembangunan berkelanjutan SDGs (*Sustainable Development Goals*).

**Gambar 4.1** SDGs (Sustainable Development Goals)



Sumber: <https://www.sdg2030indonesia.org/>

Gambar 4.1 adalah 17 tujuan dari SDGs, yaitu menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan sejahtera, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur industri dan inovasi, mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, serta kemitraan untuk mencapai tujuan.

SDGs merupakan alasan utama adanya konsep inklusi sosial dalam perpustakaan, dalam hal ini perpustakaan ikut berpartisipasi dalam bidang pendidikan untuk menghasilkan masyarakat yang literat untuk membangun kesejahteraan masyarakat, dalam partisipasi untuk pembangunan nasional

berkelanjutan, Perpustakaan Nasional RI mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

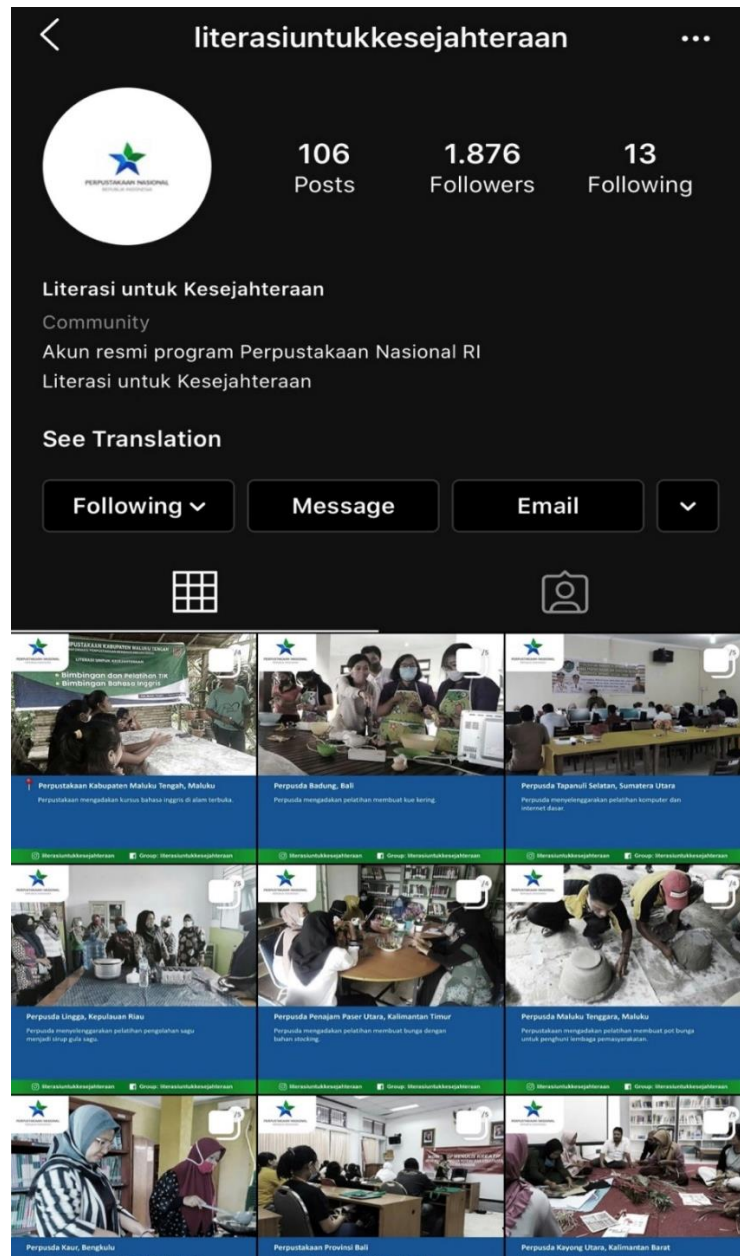
#### **4.2.1 Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial**

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pertama kali dibentuk oleh Perpustakaan Nasional RI pada tahun 2018. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini merupakan bentuk dari partisipasi perpustakaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan SDGs. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan program replikasi yang sebelumnya dibentuk oleh pihak swasta dengan dukungan *Bill & Melinda Gates Foundation* dan *Coca-Cola Foundation* dengan nama program PerpuSeru yang dibentuk pada tahun 2011.

Program PerpuSeru dilaksanakan oleh pihak swasta selama tujuh tahun kemudian program ini diserahkan kepada Perpustakaan Nasional RI dan terjadi perubahan nama program menjadi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, secara konsep keseluruhan program PerpuSeru dengan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tidak berbeda karena kedua program tersebut menjadikan perpustakaan di Indonesia menjadi tempat pusat kegiatan maupun belajar bagi masyarakat juga memberdayakan masyarakat inklusif guna meningkatkan kualitas mutu kehidupan masyarakat. Perbedaan kedua program ini yaitu terletak pada cakupan penjangkauan area untuk pelaksanaan program lebih luas pada program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Pelaksanaan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dimulai dengan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan seperti Bappenas, Bappeda, dan instansi lainnya, juga kerja sama dengan perpustakaan di seluruh Indonesia dan para komunitas penggiat literasi. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan di Indonesia, meningkatkan penggunaan layanan perpustakaan oleh masyarakat, membangun komitmen serta dukungan *stakeholder* untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menghadirkan masyarakat yang literat melalui perpustakaan. Dalam melaksanakan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Perpustakaan Nasional RI membuat media sosial yaitu melalui *instagram* agar masyarakat lebih mengenal pentingnya peran perpustakaan terhadap masyarakat, berikut merupakan media sosial dari program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

**Gambar 4.2 Media Sosial *Instagram* Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial**



Sumber: *Instagram* Literasiuntukkesejahteraan

Gambar 4.2 merupakan media sosial *instagram* program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, akun *instagram* ini dibuat oleh Perpustakaan Nasional RI sebagai bentuk perkembangan pelaksanaan program Transformasi



Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, *update* mengenai pelibatan kegiatan masyarakat dengan perpustakaan di seluruh Indonesia, dan mengenalkan kepada masyarakat luas mengenai program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan perpustakaan terutama pada daerah terpencil untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.

### 4.3 Profil Informan

Pemilihan informan diperoleh berdasarkan kriteria informan yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti. Terdapat tiga kriteria dalam pengambilan informan yaitu, berstatus sebagai pegawai Perpustakaan Nasional RI, pegawai yang memiliki tugas dalam menjalankan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, dan pegawai yang memiliki pengalaman minimal 1 tahun dalam berpartisipasi dalam program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan tersebut, peneliti memperoleh tiga informan yang bersedia untuk diwawancarai, berikut merupakan profil dari informan yang telah diwawancarai oleh peneliti.

Tabel 4. 1 Profil Informan

No.	Keterangan	Bidang
1.	Informan 1	Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
2.	Informan 2	Bidang Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus
3.	Informan 3	Bidang Layanan Koleksi Umum